

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap prosedur sistem Real Time Gross Settlement yang dibuat berdasarkan Keputusan Direksi No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan Real Time Gross Settlement bahwa PT Bank DKI telah menetapkan standar operasional prosedur sesuai dengan SE No 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 yang merupakan landasan hukum sesuai peraturan Bank Indonesia dan pedoman atas pelaksanaan prosedur sistem Real Time Gross Settlement.

Namun pada pelaksanaannya ada beberapa bagian prosedur dalam menjalankan sistem *Real Time Gross Settlement* tidak dijalankan sebagaimana mestinya seperti pemeriksaan dan pemberian persetujuan oleh pejabat yang berwenang sering diabaikan bahkan dilewatkan karena beberapa kendala yang sering terjadi seperti pejabat yang berwenang tidak berada di tempat, karena tuntutan penyelesaian akhir yang cepat sehingga proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan terlewatkan padahal hal tersebut dapat mempermudah serta memperbesar risiko terjadinya penyelewengan dana oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab.

Secara umum sistem operasional yang diberlakukan telah memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan, tetapi suatu sistem secanggih apapun tidak akan berfungsi jika pengguna sistem tersebut tidak mempunyai kesadaran serta tanggung jawab terhadap wewenang yang telah diberikan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan semoga dapat dijadikan pertimbangan, antara lain

1. Sebaiknya setiap transaksi RTGS yang masuk pada bagian teller langsung dijalankan satu per satu, tidak harus dikumpulkan terlebih dahulu sehingga menyebabkan penyelesaian akhir akan lebih lama dan berdampak pada proses pemeriksaan laporan RTGS tidak dilakukan secara efektif oleh pejabat yang berwenang.
2. PT Bank DKI diharapkan menambah pegawai *outsourcing* yang ditempatkan di bagian *Back Office* untuk membantu kegiatan operasional khususnya pengambilan setiap transaksi kliring maupun RTGS yang masuk pada bagian Teller serta dapat membantu meminta tanda tangan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian persetujuan atas laporan RTGS yang dibuat sehingga dapat

memperkecil risiko terjadinya suatu penyelewengan dana yang dapat dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab.

3. Pejabat yang mempunyai wewenang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dalam pemeriksaan dan pemberian persetujuan atas transaksi RTGS yang dibuat dalam laporan RTGS guna memperkecil risiko terjadinya penyelewengan dana oleh para pegawai.